

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA**

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
PURWAKARTA PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;

- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 20) Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-85/KN.1/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 Pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan untuk Catatan atas Laporan Barang Milik Negara ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PURWAKARTA.

C. Periode Laporan

Periode pelaporan untuk Catatan atas Laporan Barang Milik Negara ini adalah Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023.

2. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semesteran maupun Tahunan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-E1) dan Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Pengelola Barang.

Laporan Barang Milik Negara KPKNL PURWAKARTA Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain:

- A. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan,

(d) Jalan dan Jembatan, (e) Irigasi, (f) Jaringan, (g) Aset Tetap dalam Renovasi, (h) Aset Tetap Lainnya, dan (i) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi.

- C. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap, Laporan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- D. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- E. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan sebagaimana telah disesuaikan dengan KMK-145/KMK.06/2014 tentang Perubahan atas KMK-94/KMK.06/2014.
- F. Kebijakan amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- G. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- H. Kebijakan penilaian kembali BMN sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2023 KPKNL Purwakarta merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta.

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2023 KPKNL PURWAKARTA ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN, Laporan BMN terdiri atas :

- a. Neraca;
- b. Laporan Barang Persediaan;
- c. Laporan Barang Pengguna (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- d. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- e. Laporan Aset Tak Berwujud;
- f. Laporan Barang Bersejarah;
- g. Laporan Penyusutan;
- h. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- i. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- j. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- k. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

4. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

4.1 Saldo Awal BMN Tahunan Tahun Anggaran 2023

Nilai Saldo Awal BMN Tahun Anggaran 2023 menurut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta adalah sebesar Rp28,031,996,136,00 (Dua puluh delapan miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

4.2 Ringkasan Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2023

Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.780.325,00 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp24.953.915,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan total mutasi bersih kurang sebesar Rp8.173.590,00 (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah).

Kode	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
17111	Barang Konsumsi	24.953.915,00	(8.173.590,00)	16.780.325,00
TOTAL		24.953.915,00	(8.173.590,00)	16.780.325,00

b. Tanah (2.01)

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.819.298.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 3.555m² (tiga ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan nilai sebesar Rp20.819.298.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan mutasi bersih sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Mutasi tanah yaitu:

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) PURWAKARTA PERIODE TAHUNAN TA 2023

Kode	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
	Tanah	20.819.298.000,00	0	20.819.298.000,00
TOTAL		20.819.298.000,00	0	20.819.298.000,00

Keseluruhan tanah digunakan sendiri oleh KPKNL Purwakarta untuk menunjang penyelesaian tugas dan fungsi.

Tidak terdapat sengketa/permasalahan pada Barang Milik Negara berupa tanah milik KPKNL PURWAKARTA dan telah bersertifikat.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.859.209.062,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu enam puluh dua rupiah). Jumlah tersebut dari saldo awal sebesar Rp5.212.913.170,00 (lima miliar dua ratus dua belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan mutasi bersih kurang sebesar Rp353.704.108,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu seratus delapan rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah Rp994.810.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.244.221.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dikurangi dengan total mutasi bersih sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp249.411,000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas ribu rupiah);

2) Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan total mutasi bersih sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp13,600,000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

3) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah total sebesar 530 (lima ratus tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp2.057.284.611,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah). Jumlah tersebut terdiri

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) PURWAKARTA PERIODE TAHUNAN TA 2023

dari saldo awal sejumlah 610 (enam ratus sepuluh) unit dengan nilai sebesar Rp2.303.501.161,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta lima ratus satu ribu seratus enam puluh satu rupiah). dengan total mutasi bersih kurang selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebesar 80 (delapan puluh) unit dengan nilai Rp246.216.550,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

4) Alat Studio(3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan total jumlah 11 (sebelas) unit dengan nilai sebesar Rp258.988.817,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah 15 (lima belas) unit dengan nilai sebesar Rp290,417,112,00 (dua ratus Sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu seratus dua belas rupiah) dengan total mutasi bersih kurang selama Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp31.428.295,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

5) Komputer Unit dan Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Komputer Unit dan Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) unit sebesar Rp1.186.895.634,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 90 (sembilan puluh) unit dengan nilai sebesar Rp1.027.143.897,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan mutasi bersih tambah sebanyak 9 (sembilan) unit sebesar Rp159.751.737,00 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

5) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.225.704.024,00 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat ribu dua puluh empat rupiah).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 sebanyak sebanyak 4 (enam) unit dengan nilai sebesar Rp8.005.906.500,00 (delapan miliar lima juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan

operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00(nol rupiah).

1) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.016.955.925,00 (satu miliar enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp13,922,600,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp13,922,600,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan mutasi bersih sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) unit dengan nilai sebesar Rp13,922,600,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 143 (delapan) unit sebesar Rp13,922,600,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan mutasi bersih sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Kelompok barang bahan perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah).

5. INFORMASI BMN LAINNYA

5.1 Perkembangan Nilai BMN

- a. Perkembangan nilai BMN sesuai laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel selama 5 (lima) periode laporan terakhir disajikan sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) PURWAKARTA PERIODE TAHUNAN TA 2023

No.	Periode Laporan	Nilai BMN Pada Laporan GabunganIntrakomptabel dan Ekstrakomptabel (Rp)	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Semester II TA 2021	34.480.327.651,00	(101.250.000,00)	-1,01%
2	Semester I TA 2022	34.139.149.382,00	(341.178.269,00)	-1,01%
3	Semester II TA 2022	33.666.609.270,00	(472.540.112,00)	-1,01%
4	Semester I TA 2023	33.733.462.270,00	66.853.000,00	0,99%
5	Semester II TA 2023	34.346.024.159,00	630.561.889,00	0,99%

5.2 Penerimaan Negara yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara

Jumlah Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (Penjualan sisa bongkaran) pada Periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5.3 Dokumen Sumber Tanah

Terdapat total tanah sebanyak 4 (empat) NUP dengan luas bidang tanah total sebesar 3.555m². Adapun rincian data tersebut yaitu :

No.	Unit Kerja	Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Total		% Sertifikat	% Tidak bersertifikat
		Jumlah NUP	Luas (m ²)	Jumlah NUP	Luas (m ²)	NUP	Luas (m ²)		
1	KPKNL Purwakarta	4	3.555	-	-	4	3.555	100	0
Total		4	3.555	-	-	4	3.555	100	0

Adapun rincian data bersertifikat yaitu :

No.	Unit Kerja	Bersertifikat a.n.					
		Pemerintag R.I. c.q		Kementerian / Lembaga		Pihak Ketiga	
		Kementerian / Lembaga					
		Jumlah NUP	Luas (m ²)	Jumlah NUP	Luas (m ²)	Jumlah NUP	Luas (m ²)
1	KPKNL PURWAKARTA	4	3.555	-	-	-	-
Total		4	3.555	-	-	-	-

5.4 Barang Milik Negara dalam kondisi hilang

Saldo Barang Milik Negara dalam kondisi hilang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan mutasi bersih sebesar 0 (nol) unit dan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Adapun rincian data tersebut yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah NUP	Total Perolehan	Keterangan
NIHIL				

5.5 Barang Milik Negara Bersengketa

Barang Milik Negara Bersengketa di Pengadilan merupakan Barang Milik Negara yang didaftarkan bersengketa baik Pengadilan Negari, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usah Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Agung.

Saldo Barang Milik Negara Bersengketa Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri darisaldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan mutasi bersih 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

No.	Nama Barang	Jumlah NUP	Total Perolehan	Keterangan
NIHIL				

6. INFORMASI PENGELOLAAN BMN

6.1 Penetapan Status Penggunaan BMN

Rincian data nilai dan jumlah BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada KPKNL Purwakarta Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai Perolehan BMN
1	Tanah	4	20.819.298.000,00
2	Bangunan	6	6.269.074.586,00
3	Selain Tanah dan Bangunan Yang Memiliki Bukti Kepemilikan	10	212.807.141,00
4	Selain Tanah dan Bangunan Yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan	874	390.563.542,00

6.2 Pengelolaan Barang Milik Negara

Rincian Pengelolaan Barang Milik Negara pada KPKNL Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jml
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	1	-	-	1	1
5	Dalam proses tindak lanjut PenggunaBarang / Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkanKeputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	1	1
7	Tindaklanjut oleh Kuasa PenggunaBarang	-	-	-	1	1
8	Selesai serah terima	-	-	-	1	1

7. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara

Purwakarta,
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Wahjudi Prajogo

NIP 197206221997031001